

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Seiring dengan kompleksitas bisnis dan semakin terbukanya peluang usaha dan investasi menyebabkan risiko terjadinya kecurangan di berbagai sektor baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan yang menggunakan standar akuntansi sebagai pembukuannya. Terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi membuat pihak internal maupun eksternal perusahaan atau entitas tertentu menjadi dirugikan. Sebagai contoh, volume produktifitas organisasi melemah, volume produktivitas organisasi melemah, belanja sosial organisasi semakin sedikit, kepercayaan masyarakat yang dilayani beralih ke organisasi lain, dan mitra kerja tidak selera lagi untuk bekerja sama (Facrunisa, 2015).

Kecurangan atau *fraud* adalah tindakan/perbuatan yang dimulai dengan adanya niat, kemudian berusaha mencari-cari kesempatan atau sebaliknya dimulai dengan adanya kesempatan dan kesempatan tersebut menimbulkan niat. Dengan adanya niat dan tersedianya kesempatan maka selanjutnya adalah berpikir seberapa besar resiko melakukan perbuatan tersebut. Jika merasa mampu menerima resiko maka terjadilah tindakan kecurangan dalam sebuah organisasi/lembaga, tetapi jika dirasa resiko yang dirasa besar maka akan menunda bahkan menghindari tindakan kecurangan. Tindakan korupsi merupakan candu bagi pelakunya, karena dengan melakukan tindakan korupsi akan memberikan sejumlah uang dalam waktu yang singkat oleh karena itu,

*fraud* mendapat perhatian tidak sedikit dari kalangan-kalangan aktivis akuntansi terutama auditor. Pelaku tindakan *fraud* dapat menghancurkan suatu bisnis tertentu dan entitas tertentu. Meskipun demikian tindakan *fraud* masih banyak dilakukan oleh pelaku tindakan *fraud* karena beberapa alasan. Salah satunya pengendalian internal yang kurang efektif, peraturan yang kurang tegas. Maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan *Transparency International* pada tahun 2013. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 114 dari 177 negara. IPK tersebut lebih buruk dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei Darusalam, Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura. Selanjutnya dalam laporan tahunan 2013 KPK telah menyetor sebesar Rp 120.498.412.439,00 dari hasil kasus Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi ke Kas Negara/Kas Daerah. Dalam lingkungan pemerintah daerah salah satu kasus yang terjadi adalah kasus pidana korupsi yang menjerat salah satu Kepala Dinas Pemerintahan di kabupaten Jember dan mantan Sekretaris Daerah pada tahun 2015.

Salah satu kejadian di pemerintahan kabupaten Madiun adalah kasus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atas kasus dugaan korupsi yang dinyatakan oleh kepala Kejaksaan Negeri kabupaten Madiun I Made Jaya Ardana, Made juga menambahkan sedikitnya akan ada dua nama pejabat yang terseret penyimpangan anggaran rutin tahun 2015 senilai Rp 2 miliar. Kasus kecurangan/*fraud* seperti ini masih banyak terjadi di lingkup pemerintahan

daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi individu melakukan tindak kecurangan/*fraud* berdasarkan persepsi pegawai pemerintahan di kabupaten Madiun.

Banyak pihak setuju agar tidak memberikan peluang bagi terjadinya kecurangan akuntansi melalui berbagai kebijakan, antara lain TAP MPR XVI Tahun 1998, UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan PP No.71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Soepardi, 2007 dalam Thoyibatun, 2009).

Untuk menangani masalah kecurangan akuntansi, diperlukan monitoring, untuk mendapatkan hasil monitoring, yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2006 dalam Adelin, 2013). Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan serta restruksasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan, 2009). Keefektifan pengendalian internal dapat diartikan bahwa tujuan perusahaan telah berjalan sesuai perencanaan dengan pengendalian dan pengawasan, sehingga dengan adanya pengendalian dan pengawasan kecenderungan kecurangan tidak akan terjadi. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif pada sektor pemerintahan diharapkan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi. Begitu pula hasil tersebut di dukung oleh Zulkarnain (2013), Artini, Adiputra, dan Herawati (2014) dan Facrunisa (2015).

Faktor kedua yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah penegakan peraturan. Penegakan peraturan harus diperhatikan dikarenakan penegakan peraturan di Indonesia masih lemah yang mengakibatkan tingginya tingkat kecurangan di kalangan aparat saat ini, hukuman yang dibuat tidak memberikan efek jera dan banyaknya tindakan kolusi sehingga aturan tidak berfungsi/lemah. Dengan adanya penegakan peraturan yang tegas pada sektor pemerintahan diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Syahadat dan Damayanti (2017) bahwa penegakan peraturan internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu budaya etis organisasi. Menurut Fachrunisa (2015) budaya etis merupakan faktor yang paling kritis dalam organisasi. Efektifitas dalam organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang kuat, yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya tingkat budaya etis organisasi yang kuat pada sektor pemerintahan diharapkan mampu mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian Facrunisa (2015) membuktikan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018)

menunjukkan bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Rizky dan Fitri (2017) tentang pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum, dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi. Peneliti mereplikasi dua variabel independen dalam penelitian Rizky dan Fitri (2017) yaitu keefektifan pengendalian internal dan penegakan peraturan. Serta menambahkan satu variabel lain yaitu budaya etis organisasi dari penelitian Facrunisa (2015). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizky dan Fitri (2017). Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian yang dilakukan di SKPA Provinsi Aceh dalam penelitian ini peneliti melakukan di OPD Kabupaten Madiun. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, dan Budaya Etis Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan/*fraud* Akuntansi di sektor pemerintahan?
2. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan/*fraud* Akuntansi di sektor pemerintahan?

3. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan/*fraud* Akuntansi di sektor pemerintahan

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan/*fraud* Akuntansi di sektor pemerintahan
2. Untuk menganalisis pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan/*fraud* Akuntansi di sektor pemerintahan
3. Untuk menganalisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan/*fraud* Akuntansi di sektor pemerintahan

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dalam memecahkan masalah. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan dan prakteknya

2. Bagi Objek Penelitian

Bagi Objek penelitian yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan dalam usaha mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan/*fraud* di instansi pemerintahan, dengan menekankan faktor-faktor penyebab terjadinya kecenderungan kecurangan/*fraud* di sektor pemerintahan seperti yang disajikan peneliti.

#### **E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

Sistematika penulisan laporan skripsi terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis serta, kerangka konseptual atau model penelitian.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian: populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

#### **BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

#### **BAB V: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.